



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jl. Lingkar Selatan, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul Telp.(0274)4396412 Fax.(0274)4396415
Email : pengadilan_tinggi_yogyakarta@yahoo.co.id Website : pt-yogyakarta.go.id
YOGYAKARTA 55187

Nomor : W13.U/927/OT.01/5/2017
Lampiran : Satu Set.
Hal : Evaluasi LKjIP dan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)

22 Mei 2017

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Jalan Prof.DR.Soepomo,S.H, Nomor 04 Bantul
Yogyakarta

Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor : 87/BUA/OT.01.2/5/2017 tanggal 10 Mei 2017 perihal Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bersama ini kami kirimkan hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu : Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari masing masing Pengadilan Negeri se Daerah Istimewa Yogyakarta.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Haryanto, SH, MH

NIP. 19530419 198103 1 001

Tembusan :

1. Badan Pengawasan MARI
2. Badan Urusan Administrasi c.q. Biro Perencanaan dan Organisasi



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jalan Lingkar Selatan, Wojo, Sewon, Yogyakarta – 55187

Telp. 0274 – 4396 412 Fax. 0274 – 4396 415

WEBSITE : <http://www.pt-yogyakarta.go.id>

Nomor : W13-U/935 / BP / OT. 01.2/ 5 /2017

22 Mei 2017

Lampiran : Tiga Lembar

Perihal : Laporan Hasil Evaluasi
Kinerja Instansi Pemerintah
Pengadilan Negeri Bantul

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Di

BANTUL

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bantul dimaksudkan untuk :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 - b. Menilai Akuntabilitas kinerja instansi.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
 - Evaluasi dilaksanakan terhadap 5(lima) komponen manajemen kinerja, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.
 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 s.d 100.

Setiap jawaban “ Ya “ akan diberikan nilai 1, sedangkan jawaban “ Tidak “ akan diberikan nilai 0, untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada judgement evaluator dengan kriteria sebagai berikut :

Jawaban	Kriteria	Nilai
a	Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s.d 100%)	1
b	Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s/d 80%)	0,75
c	Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s/d 60%)	0,50
d	Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20% s/d 40%)	0,25
e	Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari atau sama dengan 20%)	0

4. Pengadilan Negeri Bantul memperoleh nilai sebesar 71,14% atau Baik.

5. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

a. **Perencanaan Kinerja** = Bobot 30% nilai yang diperoleh 23,71%

- 1) Dokumen Renstra telah disusun dalam satu dokumen tersendiri, namun Indikator kinerja tujuan (output/outcome) dan sasaran (output/outcome) yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
- 2) Dokumen RKT telah disusun namun indikator kinerja sasaran dan kegiatannya belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
- 3) Dokumen PKT telah disusun namun Indikator Kinerja sasaran dan kegiatannya belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik serta pencapaiannya belum sepenuhnya dimonitor secara berkala.

b. **Pengukuran Kinerja** = Bobot 25% Nilai yang diperoleh 18,10%

- 1) IKU belum sepenuhnya relevan dengan kondisi yang akan diukur serta belum cukup untuk mengukur kinerja.
- 2) Telah terdapat pengukuran atas indikator kinerja yang sudah ditetapkan, namun hasil pengukuran kinerja belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- 3) Indikator kinerja belum sepenuhnya memiliki pengumpulan data kinerja secara berkala sehingga data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

c. **Pelaporan Kinerja** = Bobot 15% nilai yang diperoleh 12,54%

- 1) Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan negeri Bantul telah disusun dan disampaikan tepat waktu.

- 2) Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) belum melakukan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja secara keseluruhan, masih terdapat sasaran yang belum dievaluasi dan dianalisis.
- 3) Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan.

d. **Evaluasi Internal** = Bobot 10% nilai yang diperoleh 5,75% :

Evaluasi kinerja telah dilakukan akan tetapi dalam pemantauan, monitoring dan evaluasi kinerja/kegiatan secara periodik belum optimal dan belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

e. **Pencapaian kinerja** = Bobot yang diperoleh 20% nilai yang diperoleh 11,04%:

Aspek ketepatan indikator-indikator, ketepatan target, kehandalan informasi kinerja dan keleslarasan kinerja, menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja outcome masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut lebih disebabkan oleh ketepatan dalam merumuskan sasaran indikatornya, sehingga tampak uraian pelaksanaan kegiatan dan proses telah dilakukan, namun belum menggambarkan kinerja atau outcome yang memadai.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hal diatas direkomendasikan :

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Indikator Kinerja tujuan (output/outcome) dan sasaran (output/outcome) yang ditetapkan pada renstra seharusnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
- 2) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan pada RKT dan PKT harus memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik serta dimonitor secara berkala.

b. Pengukuran Kinerja

- 1) IKU harus relevan dengan kondisi yang akan diukur serta cukup untuk mengukur kinerja.
- 2) Hasil pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- 3) Indikator kinerja harus memiliki pengumpulan data kinerja secara berkala sehingga data kinerja dapat diandalkan.

c. Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) harus melakukan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja secara keseluruhan yang termuat dalam penetapan kinerja sehingga informasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat diandalkan.

d. Evaluasi Kinerja

Melaksanakan Evaluasi kinerja melalui pemantauan, monitoring dan evaluasi kinerja/kegiatan secara periodik agar dapat ditindaklanjuti secara optimal untuk perbaikan peningkatan kinerja organisasi tahun yang akan datang.

e. Pencapaian Kinerja

Dalam merumuskan sasaran dan indikator agar memperhatikan ketepatan target yang telah ditetapkan, ketepatan indikator kinerja, kehandalan informasi dan keselarasan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi pengadilan sehingga uraian pelaksanaan kegiatan dan proses yang telah dilakukan menggambarkan kinerja atau outcome yang memadai.

Demikian hasil evaluasi atas kinerja Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2016, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Ketua,



Haryanto, SH., MH.
NIP. 19530419 198103 1 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi c.q Biro Perencanaan Dan Organisasi Mahkamah Agung RI.

KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI BANTUL
TAHUN : 2017

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN/BOBOT (%)	UNIT KERJA		TOTAL
		Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)				23,71
I. RENCANA STRATEGIS (10%)				7,57
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)				
1	Dokumen Renstra telah ada	y	1	1,00
2	Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah	b	0,75	0,75
				1,75
b. KUALITAS RENSTRA (5%)				
3	Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil	b	0,75	0,54
4	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program	b	0,75	0,54
5	Renstra telah menyajikan IKU	b	0,75	0,54
6	Indikator kinerja tujuan (output/outcome) dan sasaran (output/outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	b	0,75	0,54
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	b	0,75	0,54
8	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya	b	0,75	0,54
9	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	c	0,5	0,36
				3,57
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)				
10	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan	b	0,75	0,75
11	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	b	0,75	0,75
12	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala	b	0,75	0,75
				2,25
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (7,5%)				6,59
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (1,5%)				
1	Dokumen RKT telah ada	y	1	0,50
2	Dokumen RKT disusun sebelum mengajukan RKA	y	1	0,50
3	Dokumen RKT telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan	a	1	0,50
				1,50
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (3,75%)				
4	Sasaran telah berorientasi hasil	b	0,75	0,47
5	Target dalam dokumen RKT merupakan cara untuk mencapai sasaran	b	0,75	0,47
6	RKT telah menyajikan IKU	a	1	0,63
7	Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	b	0,75	0,47
8	Target kinerja ditetapkan dengan baik	a	1	0,63
9	Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen Renstra	b	0,75	0,47
				3,13
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (2,25%)				
10	Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun perjanjian kinerja (PK)	a	1	1,13
11	Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran (RKA) (a.l. Target kinerja RKT vs Target kinerja RKA)	b	0,75	0,84
				1,97

III. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA (12,5%)			9,54
a. PEMENUHAN PK (2%)			
1 Dokumen PK unit kerja telah ada	y	1	0,67
2 Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui	y	1	0,67
3 Dokumen PK telah memuat sasaran, indikator kinerja, dan target jangka pendek	a	1	0,67
			2,00
b. KUALITAS PK (6,5%)			
4 Sasaran telah berorientasi hasil	b	0,75	0,98
5 PK telah menyajikan IKU	a	1	1,30
6 Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	c	0,5	0,65
7 Target kinerja ditetapkan dengan baik	b	0,75	0,98
8 Dokumen PK telah selaras dengan dokumen RKT	b	0,75	0,98
			4,88
c. IMPLEMENTASI PK (4%)			
9 Dokumen PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	c	0,5	0,67
10 Dokumen PK telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan	b	0,75	1,00
11 Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	b	0,75	1,00
			2,67
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)			18,10
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)			
1 Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal	y	1	2,50
2 Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja	b	0,75	1,88
			4,38
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)			
3 IKU telah dapat diukur secara obyektif	b	0,75	0,78
4 IKU telah menggambarkan hasil	b	0,75	0,78
5 IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur	b	0,75	0,78
6 IKU telah cukup untuk mengukur kinerja	b	0,75	0,78
7 IKU telah diukur realisasinya	c	0,5	0,52
8 Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif	b	0,75	0,78
9 Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil	b	0,75	0,78
10 Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur	b	0,75	0,78
11 Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sarannya	b	0,75	0,78
12 Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya	b	0,75	0,78
13 Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	b	0,75	0,78
14 Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)	c	0,5	0,52
			8,85
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)			
15 IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	b	0,75	1,13
16 IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	b	0,75	1,13
17 IKU telah direviu secara berkala	c	0,5	0,75
18 Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja	b	0,75	1,13
19 Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	c	0,5	0,75
			4,88
C. PELAPORAN KINERJA (15%)			12,54
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)			
1 LKjIP telah disusun	y	1	1,50
2 LKjIP telah disampaikan tepat waktu	y	1	1,50
			3,00
II. KUALITAS PELAPORAN (7,5%)			
3 LKjIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi output/outcome	a	1	1,07

4	LKjIP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	a	1	1,07
5	LKjIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan	b	0,75	0,80
6	LKjIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	b	0,75	0,80
7	LKjIP menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	b	0,75	0,80
8	LKjIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja	b	0,75	0,80
9	Informasi kinerja dalam LKjIP dapat diandalkan	b	0,75	0,80
				6,16
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)				
10	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan	b	0,75	0,84
11	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	b	0,75	0,84
12	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja	b	0,75	0,84
13	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja	b	0,75	0,84
				3,38
D. EVALUASI INTERNAL (10%)				5,75
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)				
1	Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja	y	1	1,00
2	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya	b	0,75	0,75
				1,75
II. KUALITAS EVALUASI (5%)				
3	Monitoring dan evaluasi telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan	c	0,50	2,50
				2,50
III. PEMANFAATAN HASIL EVALUASI (3%)				
4	Rekomendasi monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja	c	0,50	1,50
				1,50
E. CAPAIAN KINERJA (20%)				11,04
I. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)				
1	Target dapat dicapai	c	0,5	1,25
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	c	0,5	1,25
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	c	0,5	1,25
				3,75
II. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)				
4	Target dapat dicapai	c	0,5	2,08
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	c	0,5	2,08
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	b	0,75	3,13
				7,29
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)				71,14